

## **Efektivitas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang Pasca Penataan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja**

*Muhammad Nuh, Devi Yulistiani<sup>1</sup>*

### **Abstrak**

Efektivitas kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu (1) Indikator efisiensi pelayanan, (2) Indikator produktivitas, (3) Indikator kekompakan antar pegawai, (4) Indikator sarana dan prasarana. Indikator tersebut menjadi acuan penilaian tentang efektivitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang Pasca Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang dilakukan pada tahun 2017. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, pada awal tahun 2017 Pemerintah Pusat mengharuskan setiap daerah untuk melakukan penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru yang diatur melalui PP No. 18 Tahun 2016. Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja ini dimaksudkan untuk merampingkan struktur organisasi pada dinas dan badan daerah termasuk Kabupaten Batang melalui Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

***Kata Kunci :*** *Efektivitas, Indikator Efektivitas, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang, Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja*

---

<sup>1</sup> Muhammad Nuh, Mahasiswa Program Doktor Administrasi Publik Undip, Devi Yulistiani, Alumni Ilmu Politik Unwahas

## PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan dewasa ini bergeser dari yang semula sentralisasi (terpusat) menjadi desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.<sup>2</sup> Otonomi daerah merupakan wujud nyata dari desentralisasi.<sup>3</sup> Otonomi daerah merupakan wujud nyata dari desentralisasi. Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup> Pemberian otonomi daerah kepada Kabupaten/Kota dimaksudkan agar daerah tersebut menjadi lebih mandiri dalam mengurus urusan rumah tangganya sendiri dan tidak selalu tergantung pada pemerintah pusat. Otonomi daerah merupakan hasil dari reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi yang dilakukan juga bertujuan untuk menciptakan *good governance* yaitu menciptakan pelayanan publik yang transparan, sederhana, murah, tanggap dan akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan ke publik.

Pemerintah sebagai institusi pelayan masyarakat perlu menemukan cara yang lebih profesional dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Dalam konteks pemerintahan, kebutuhan masyarakat menjadi tanggungjawab pemerintah. Pemerintah perlu menyelenggarakan pemerintahan yang dinamis, cepat dan tepat sasaran. Pemerintah harus memperbaiki percepatan pelayanan publik. Karena dalam organisasi pemerintahan terdahulu, struktur organisasinya masih sangat gemuk, banyak aturan, multilevel, prosedur yang ruwet, serta banyak keluhan dari masyarakat mengenai adanya pungutan liar dan praktek calo atau orang ketiga untuk melancarkan pengurusan. Dalam organisasi pemerintahan di masa depan, strukturnya akan ramping dengan sedikit aturan, sedikit level, terorganisasi, mudah, cepat dan transparan. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, pada tahun 2017 Pemerintah Pusat mengharuskan setiap daerah untuk melakukan penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru yang mulai berlaku pada awal Januari 2017. Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja ini dimaksudkan untuk merampingkan struktur organisasi pada dinas dan badan daerah. Idelanya struktur pemerintahan daerah itu miskin struktur

---

<sup>2</sup> UU No. 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 8 tentang Pemerintahan Daerah*

<sup>3</sup> UU No. 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 8 tentang Pemerintahan Daerah*

<sup>4</sup> UU No. 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 6 tentang Pemerintahan Daerah*

kaya fungsi, sehingga tidak menghabiskan banyak anggaran namun tetap menyediakan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, pada awal tahun 2017 Pemerintah Pusat mengharuskan setiap daerah untuk melakukan penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru yang diatur melalui PP No. 18 Tahun 2016. Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja ini dimaksudkan untuk merampingkan struktur organisasi pada dinas dan badan daerah. Melalui Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dinas-dinas di pemerintahan Kabupaten Batang di tata sedemikian rupa sehingga adanya penggabungan antar dinas dan muncul dinas baru yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Batang. Penggabungan antara dinas dan badan dilakukan atas dasar kesesuaian tugas dan fungsi dinas yang bersangkutan. Penggabungan antara dinas dan badan dilakukan atas dasar kesesuaian tugas dan fungsi dinas yang bersangkutan. Dalam hal ini pemerintah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan publik untuk menunjang kebutuhan masyarakat. Karena hal tersebut, maka pada penataan Organisasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Batang saat ini Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPT) di gabung dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Penggabungan kedua dinas dan badan ini kini bernama Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker) Kabupaten Batang. Alasan penggabungan antara Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPT) dengan Dinas Tenaga Kerja karena terdapat kesesuaian tugas antar bidangnya.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan pertanyaan yang akan dikaji dalam penulisan ini yaitu : Bagaimana efektivitas kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja pasca penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja baru di Pemerintahan Kabupaten Batang?

### **Kerangka Dasar Teori**

#### **Efektivitas**

Menurut Agung Kurniawan dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara

pelaksanaannya.<sup>5</sup> Menurut Penulis bahwa efektivitas adalah Kemampuan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Efektivitas suatu organisasi dapat diukur melalui beberapa aspek, namun dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa dalam melakukan pengukuran efektivitas organisasi dapat dilakukan melalui indikator sebagai berikut:

a) Efisiensi Pelayanan

Efisiensi merupakan kemampuan sebuah organisasi untuk meminimalkan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.

b) Produktivitas

Produktivitas yang dimaksud merupakan output yang berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan dalam kurun waktu tertentu.

c) Kekompakan antar pegawai

Produktifitas sebuah organisasi tidak terlepas dari kekompakan antar pegawai. Jika dalam suatu organisasi kekompakan antar pegawai bisa terjaga maka dapat dipastikan organisasi tersebut akan bisa bertahan lama.

d) Sarana dan prasarana pendukung

Saranan dan prasarana merupakan alat penunjang keberhasilan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai rencana.

### Konsep Kinerja

Irham Fahmi dalam bukunya *Manajemen Kinerja* menyatakan bahwa Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented yang dihasilkan selama satu periode.<sup>6</sup> Sedangkan menurut penulis kinerja merupakan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan pendapat Moeheriono yang dikutip oleh Ma'ruf Abdullah dalam bukunya *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*, menyatakan bahwa terdapat enam indikator kinerja, namun masing-masing organisasi dapat mengembangkannya sesuai dengan misi organisasi tersebut. Keenam indikator tersebut adalah :

---

<sup>5</sup> Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta : Pembaharuan, 2005. Hal 109

<sup>6</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Kinerja*, Bandung : Alfabet, 2010. Hal. 2

1. Efektif, yaitu mengukur derajat kesesuaian yang dihasilkan dalam mencapai sesuatu yang diinginkan. Kinerja dikatakan efektif jika tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Efisien, yaitu mengukur derajat kesesuaian proses menghasilkan output dengan menggunakan biaya serendah mungkin. Artinya organisasi dapat mencapai tujuan dengan meminimalkan sumber daya yang ada.
3. Kualitas, yaitu mengukur derajat kesesuaian antara kualitas produk atau jasa yang dihasilkan dengan kebutuhan yang diharapkan konsumen. Jadi, jika kualitas kinerja baik maka hasil yang diperolehpun akan baik pula dan bermanfaat untuk masyarakat.
4. Ketepatan waktu, yaitu mengukur apakah pekerjaan telah diselesaikan secara benar dan tepat waktu. Pemanfaatan waktu yang tepat oleh para karyawan bisa membuat organisasi lebih efektif.
5. Produktivitas, yaitu mengukur tingkat efektivitas suatu organisasi. Kinerja karyawan yang baik akan meningkatkan produktivitas organisasi. Meningkatnya produktivitas jelas meningkatkan efektivitas organisasi.
6. Keselamatan, yaitu mengukur kesehatan organisasi secara keseluruhan serta lingkungan kerja para karyawan ditinjau dari aspek kesehatan.<sup>7</sup>

Jadi pengukuran kinerja juga dapat diukur melalui indikator lain seperti indikator efektif, efisien, kualitas ketepatan waktu, produktivitas dan keselamatan. Dengan pengukuran kinerja diatas, dapat diketahui bahwa suatu organisasi pemerintahan ataupun swasta selalu mengembangkan ukuran indikator kinerja sesuai dengan misi organisasi tersebut. Hal ini dilakukan karena tujuan suatu organisasi tentunya berdeda satu sama lain.

### **Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sedangkan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.<sup>8</sup> Pengelompokan organisasi

---

<sup>7</sup> Ma'ruf Abdullah, *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*, Jakarta : Aswaja Presindo, 2014. Hal 151

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 *Tentang Perangkat Daerah*, Bag. Umum  
Prosiding Senas POLHI ke-2 Tahun 2019

Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (*strategic apex*), Sekretaris Daerah (*middle line*), Dinas Daerah (*operating core*), Badan/fungsi Penunjang (*technostructure*), dan Staf Pendukung (*supporting staff*).

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif merupakan penelitian dimana penulis mencoba menggambarkan atau mendeskripsikan secara sistematis mengenai Efektivitas kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang pasca Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja. Caranya adalah dengan mengumpulkan informasi terkait judul dan menganalisis dengan teori yang ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi dokumen.

### **Efektivitas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang**

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja merupakan penggabungan dari dua Organisasi Perangkat Daerah yaitu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPT) dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelajaran pembangunan di Kabupaten Batang yang fokus pada pembangunan insfrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja merupakan unsur otonomi daerah dibidang Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan Terpadu, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Waktu pelayanan di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang yaitu setiap hari senin sampai dengan hari jum'at mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB kecuali hari jum'at pelayanan hanya sampai pukul 11.00 WIB. Waktu yang diperlukan untuk pelayanan perizinan berkisar satu sampai tujuh (1-7) hari tergantung jenis perizinan dan kelengkapan persyaratan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang dilihat dari beberapa indikator yaitu :

#### **(1) Indikator Efisiensi Pelayanan**

Efisiensi merupakan kemampuan sebuah organisasi untuk meminimalkan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Untuk menciptakan pelayanan publik yang efektif dapat dilihat dari kepastian waktu pelayanan dan penyelesaian pengurusan perizinan. Indikator efisiensi pelayanan di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang masih kurang efektif. Hal tersebut dikarenakan kedisiplinan pegawai masih kurang dan belum ditematkannya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang berkaitan dengan pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Berbeda dengan layanan yang diberikan di bidang ketenagakerjaan, pelayanan yang diberikan cukup cepat, sehingga masyarakat cukup puas dengan layanan yang diberikan.

(2) ***Indikator Produktivitas***

Produktivitas merupakan capaian suatu organisasi dalam bentuk fisik seperti program atau kegiatan organisasi dalam kurun waktu tertentu. Untuk mengukur efektivitas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja penulis juga menggunakan indikator produktivitas. Produktivitas di gunakan sebagai salah satu indikator karena jika produktivitas meningkat, maka dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut telah efektif. Indikator produktivitas di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja termasuk kurang efektif. Rata-rata produktivitas dari semua bidang di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja mengalami penurunan. Bidang perizinan dan bidang penanaman modal produktivitasnya menurun pasca Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja. Bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi meski produktivitasnya menurun namun kegiatan yang dilakukan dapat tercapai sesuai target.

(3) ***Indikator kekompakan antar pegawai***

Produktifitas sebuah organisasi tidak terlepas dari kekompakan antar pegawai. Jika dalam suatu organisasi, kekompakan antar pegawai bisa terjaga maka dapat dipastikan organisasi tersebut akan bisa bertahan lama. Kekompakan pegawai ini harus dijaga untuk mencegah konflik antar pegawai yang berakibat pada kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Indikator kekompakan antar pegawai di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja memenuhi indikator efektif. Meskipun

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja merupakan penggabungan dua Organisasi Perangkat Daerah, namun pegawai terlihat kompak dengan saling membantu satu sama lain meskipun berdeda bidang.

(4) ***Indikator sarana dan prasarana***

Saranan dan prasarana merupakan alat penunjang keberhasilan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Indikator sarana dan prasarana merupakan indikator yang paling efektif. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja menempati kantor baru yang cukup luas yang terdiri dari dua lantai. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang sendiri terdiri dari dua lantai, dimana lantai pertama terdiri beberapa ruangan yaitu ruang Kepala Dinas, ruang Sekretaris, ruang Perizinan, ruang pelayanan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Transmigrasi, untuk bagian depan terdapat ruang pelayanan perizinan dan pelayanan ketenagakerjaan. Lantai dua sendiri terdapat ruang Kesekretariatan, ruang Bagian Keuangan, ruang Penanaman Modal, ruang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, ruang Rapat serta Aula. Setiap ruangan juga dilengkapi dengan pendingin udara dan beberapa komputer untuk menunjang pelayanan. Masyarakat juga merasa puas dengan sarana dan prasarana yang ada. Tempat yang mudah di jangkau masyarakat, ruang tunggu yang nyaman dan tempat parkir yang luas. Meskipun masih perlu ditambahkan untuk sarana dan prasaranya, namun secara umum indikator ini sudah efektif.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

Penilaian efektivitas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang di nilai dari 4 (empat) indikator yaitu efisiensi pelayanan, produktivitas, kekompakan antar pegawai serta sarana dan prasarana.

a) Efisiensi Pelayanan

Berdasarkan indikator efisiensi pelayanan, efektivitas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang belum efektif, meskipun pegawai melakukan pelayanan dengan cukup cepat, namun kedisiplinan pegawai masih kurang.

b) Produktivitas

Dari indikator produktivitas belum efektif. Produktivitas pasca penggabungan Organisasi Perangkat Daerah cenderung menurun, maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu meningkatkan produktivitasnya lagi dengan memaksimalkan sumber daya yang ada.

c) **Kekompakan Antar Pegawai**

Indikator kekompakan antar pegawai sudah memenuhi standar efektivitas, meskipun Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja merupakan penggabungan dari 2 (dua) Organisasi Perangkat Daerah, namun pegawai disini terlihat kompak dan saling membantu satu sama lain meskipun tidak dalam satu bidang.

d) **Sarana dan Prasarana**

Indikator sarana dan prasarana merupakan indikator yang paling sesuai dengan harapan masyarakat. Letak kantor yang strategis, tempat parkir kendaraan yang cukup luas, ruang tunggu juga luas dan nyaman bagi pengguna layanan.

Dari keempat indikator tersebut, penulis berpendapat bahwa Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang pasca adanya penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja baru sudah efektif dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Abdullah, Ma'ruf. 2014. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*. Jakarta: Aswaja Presindo.

Fahmi, Irham. 2010. *Manajemen Kinerja*, Bandung: Alfabet.

Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta : Pembaharuan.

Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Grasindo.

Nuryanto, A. Damin. 2014. *Hukum Administrasi*. Surabaya: Laskambang Justitia.

### **Undang-Undang**

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Bag. Umum

UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 8 tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 8 tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 6 tentang Pemerintahan Daerah